



Analisa Value For Money Pada Kinerja Keuangan Kota Bogor 2020 – 2022

Achmad Mufaqih¹, Sonny Fransisco², Raditya Ayu³, Aulia Apriliana⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Korespondensi penulis: Orun5099@gmail.com

Abstract. Based on the explanation of the findings above, it can be concluded that: Bogor City's financial performance is measured by economic indicators from 2020 to 2022, reaching an average of 68.5%, this figure is included in the economic category because the level of independence ratio is below 100%. Bogor City's financial performance as measured by the level of efficiency ratio in 2020 to 2022 shows an average efficiency level of 101% and the higher the efficiency level, it falls into the non-efficiency category, because it is more than 100%. Bogor City's financial performance is measured by the effectiveness ratio in 2020 to 2022 from the overall average which reached an effective ratio of 110.3% and is included in the effective category because the effective ratio is above 100%.

Keywords: Value For Money, Financial Performance, Economy.

Abstrak. Kinerja keuangan Kota Bogor diukur dengan menggunakan indikator perekonomian tahun 2020 hingga 2022 dengan skor rata – rata 68,5% yang mana kategori ekonomis tersebut masuk rasio kemandirian dibawah 100%. Indikator selanjutnya diukur dengan rasio efisiensi pada tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 101%, yang berarti tidak efisien karena melebihi angka 100%. Indikator yang terakhir rasio efektivitas diukur pada tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan skor keseluruhan rata-rata 110,3% masuk kedalam kategori efektif karena melebihi 100%.

Kata Kunci: Value For Money, Kinerja Keuangan, Perekonomian.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan selama lebih dari satu dekade memunculkan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang optimal dan transparan, yang terjadi pada momen bersejarah yang dikenal dengan “era reformasi”. Terjadi perubahan dalam praktik pemberian pelayanan dan yurisdiksi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelum era reformasi, sistem yang digunakan adalah sistem sentralisasi, namun era reformasi melahirkan sistem desentralisasi yang ditandai dengan diterapkannya kebijakan “otonomi daerah”(Dinamika et al., 2019).

Penyaluran otonomi kepada pemerintah daerah untuk menentukan sendiri anggaran dan belanja daerah (APBD) berdasarkan kebutuhan dan potensinya semakin menegaskan perlunya pengelolaan fiskal yang baik dan benar. Pemerintah harus menyampaikan atau melaporkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menilai pengelolaan keuangannya sudah baik atau belum. Evaluasi kinerja keuangan perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa sukses pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. APBD dapat dijadikan pegangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah anggaran tersebut dapat mencerminkan pelayanan dan hasil pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan di setiap daerah(Polii et al., 2020).

Konsep value for money (VFM) sangat penting pada pengelolaan keuangan sektor publik, khususnya di pemerintahan daerah. Hal ini melibatkan evaluasi efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah untuk memastikan bahwa pengeluaran tersebut memberikan hasil terbaik dengan biaya serendah mungkin.

Analisis value for money (VFM) adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi keuangan, termasuk pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dalam konteks Kota Bogor, VFM dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Analisis VFM sangat penting bagi Kota Bogor karena membantu pemerintah daerah untuk:

1. Mengoptimalkan Alokasi Sumber Daya: dengan mengidentifikasi area dimana sumber daya terbuang atau digunakan secara tidak efisien, kota dapat mengalihkan dana ke program dan proyek yang lebih efektif.
2. Meningkatkan Pelayanan: Analisis VFM membantu kota untuk menilai efektivitas layanannya dan mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan melakukan analisis VFM secara rutin, pemerintah kota dapat menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas yang penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Contoh kasus yang terdapat di Kota Bogor yaitu sistem penyediaan air minum dimana sistem penyediaan air bersih di Kota Bogor merupakan infrastruktur penting yang menyediakan air minum bersih bagi penduduknya. Namun, kota ini menghadapi tantangan dalam menjaga efisiensi dan efektivitas sistem, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai nilai manfaat investasi yang dikeluarkan.

Untuk menganalisis VFM sistem pasokan air, pemerintah kota melakukan tinjauan komprehensif terhadap operasinya, termasuk:

1. Analisis Biaya: Kota menganalisis biaya yang terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan sistem pasokan air, termasuk biaya tenaga kerja, material, dan energy.
2. Analisis keluaran: Pemerintah kota menilai kuantitas dan kualitas air yang disuplai kepada penduduknya, termasuk jumlah rumah tangga yang dilayani dan tingkat tekanan air.
3. Perbandingan dengan Tolak Ukur: Kota ini membandingkan sistem pasokan airnya dengan sistem serupa di kota-kota lain untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data kuantitatif deskriptif dengan mendeskripsikan fakta secara objektif menggunakan angka melalui pengumpulan data yang dihasilkan dari keadaan yang sebenarnya. Data dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemkot Bogor periode 2021 yang bersifat sekunder dan diperoleh melalui ppdi.bogor.go.id.

Dalam penelitian ini analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor ditentukan dengan indikator pengukuran Value for Money menggunakan tiga rasio yaitu Rasio Ekonomi, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi yang ditulis dengan rumus seperti di bawah ini:

Rasio Ekonomi

Rasio ekonomi ini berarti mendapat sumber daya (input) lewat kuantitas dan kualitas tertentu dengan tarif lebih kecil. Pengertian ilmu ekonomi merupakan perbandingan input dengan nilainya yang menerangkan dalam satuan moneter (Margareta et al., 2023):

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100$$

Tabel 1. Tingkat Ekonomi Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah penggunaan dana masyarakat/public money tersebut dapat menciptakan output yang optimal (Dewi Nur Ain, 2023):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

Tabel 2. Nilai Efektivitas

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Rasio Efisiensi

Faktor efisiensi melibatkan pencapaian hasil maksimum atas masukan atau penggunaan masukan minimum untuk mencapai hasil. Efisiensi dalam hal perbandingan antara input dan output relatif terhadap standar tenaga kerja (Musofadillah et al., 2023):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Guna melihat kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2020 hingga Tahun 2022, penulis memakai data Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diperoleh dari website resmi PPD Kota Bogor. Berikut Laporan Realitas Anggaran (LRA) Pemkot Bogor:

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
40	PENDAPATAN ASLI DAERAH	341.531.123.201,00	872.017.242.152,12	117,45%	1.015.884.276.978,26
411	Pendapatan Pajak Daerah	440.000.000.000,00	539.039.458.748,00	115,59%	689.543.005.040,00
412	Pendapatan Retribusi Daerah	36.897.027.400,00	38.070.378.259,00	96,42%	57.382.153.182,00
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.320.905.070,00	37.927.293.792,00	96,25%	28.241.844.911,00
414	Lain-lain PAD yang Sah	231.319.190.231,00	295.040.104.355,12	127,56%	248.737.212.778,95
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.633.476.644.604,00	1.415.498.666.396,00	97,39%	1.399.797.376.974,99
421	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.086.295.148.060,00	1.082.171.964.899,00	99,71%	1.106.434.405.874,00
42101	Dana Bagi Hasil Pajak	74.811.294.093,00	86.344.953.029,00	115,30%	53.495.249.384,00
42102	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	40.430.777.107,00	38.670.158.875,00	95,65%	24.159.177.895,00
42103	Dana Alokasi Umum	769.248.983.000,00	792.595.118.000,00	96,15%	838.948.449.000,00
42104	Dana Alokasi Khusus	202.304.014.360,00	198.901.128.196,00	98,59%	189.891.032.038,00
422	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	28.328.586.000,00	28.328.586.000,00	100,00%	41.873.911.000,00
42203	Dana Penyesuaian	28.328.586.000,00	28.328.586.000,00	100,00%	41.873.911.000,00
423	Transfer Pemerintah Provinsi	295.993.262.838,00	222.967.276.647,00	87,24%	252.139.954.168,00
42301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	295.993.262.838,00	222.967.276.647,00	87,24%	252.139.954.168,00
424	Bantuan Keuangan	82.839.647.208,00	80.430.838.850,00	97,34%	0,00
42401	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	82.839.647.208,00	80.430.838.850,00	97,34%	0,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	167.951.500.000,00	141.063.985.101,00	84,59%	88.328.648.000,00
431	Pendapatan Hibah	167.951.500.000,00	141.063.985.101,00	84,59%	88.328.648.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.362.959.267.805,00	2.426.579.903.649,12	102,73%	2.503.929.227.893,96
5	BELANJA				
50	BELANJA OPERASI	2.175.216.112.297,19	1.939.361.711.823,00	98,71%	2.625.462.086.541,19
511	Belanja Pegawai	1.134.954.423.225,19	1.010.111.841.189,00	89,03%	1.181.889.381.829,00
512	Belanja Barang	899.362.987.808,00	796.841.880.800,00	90,90%	711.101.422.818,19
513	Bunga	8.010.000.000,00	8.427.749.291,00	105,21%	6.878.048.142,00
515	Hibah	128.798.006.667,00	90.233.837.587,00	70,41%	79.149.334.000,00
516	Bantuan Sosial	44.492.714.000,00	40.688.702.000,00	91,19%	46.743.921.758,00
52	BELANJA MODAL	367.948.867.801,00	276.157.283.825,00	80,30%	501.833.487.778,00
521	Belanja Tanah	7.420.700.000,00	2.772.077.406,00	37,48%	18.044.000.000,00
522	Belanja Perakitan dan Mesin	143.259.000.821,00	126.790.481.108,00	90,00%	99.794.797.372,00
523	Belanja Gedung dan Bangunan	35.666.473.387,00	30.694.955.339,00	86,08%	144.703.185.377,00
524	Belanja Jalan, Jembatan dan Jangkar	117.869.282.899,00	106.794.831.171,00	90,58%	235.965.307.071,00
525	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.797.847.834,00	1.789.184.830,00	99,53%	1.910.823.018,00
526	Belanja Aset Lainnya	1.355.073.000,00	1.325.963.376,00	97,83%	895.385.000,00
53	BELANJA TAK TERKUKA	158.843.078.640,00	136.277.177.930,00	79,80%	9.425.686,90
531	Belanja Tak Terkuk	158.843.078.640,00	136.277.177.930,00	79,80%	9.425.686,90
	JUMLAH BELANJA	2.641.828.698.058,19	2.355.736.171.982,00	96,12%	2.526.504.949.978,19

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2020

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021 (AUDITED)	%	REALISASI 2020 (AUDITED)
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	614.565.650.300,00	1.075.540.906.218,11	173,37	872.817.542.182,12
3	Pendapatan Pajak Daerah	548.800.000.000,00	821.764.886.145,00	110,44	809.030.968.716,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	31.000.433.495,00	30.033.010.535,00	113,00	35.010.375.250,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.320.552.180,00	32.420.182.180,00	100,00	31.827.284.792,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	294.920.864.875,00	182.052.477.876,11	154,07	298.020.104.338,12
7	PENDAPATAN TRANSFER	1.491.272.579.491,00	1.460.090.794.020,00	100,12	1.416.499.959.390,00
8	Transfer Pemrintan Pusat - Dana Pembangan	1.090.346.529.492,00	1.070.122.260.590,00	100,92	1.090.171.994.590,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak	60.362.125.814,00	100.509.963.963,00	134,82	66.544.563.026,00
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	38.894.194.480,00	47.791.748.302,00	122,88	38.670.104.479,00
11	Dana Alokasi Umum	751.862.545.000,00	751.862.545.000,00	100,00	762.556.115.000,00
12	Dana Alokasi Khusus	189.289.498.183,00	170.188.021.371,00	89,91	189.601.128.188,00
13	Transfer Pemrintan Pusat - Lainnya	87.017.287.000,00	87.017.287.000,00	100,00	38.228.888.000,00
14	Dana Penyelesaian	57.017.287.000,00	57.017.287.000,00	100,00	28.226.546.000,00
15	Transfer Pemrintan Provinsi	238.027.063.718,00	238.618.378.020,00	87,65	222.887.378.617,00
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	249.027.063.718,00	239.649.379.020,00	97,40	222.887.378.617,00
17	Bantuan Keuangan	95.999.999.200,00	97.211.884.740,00	99,20	90.490.859.850,00
18	Bantuan Keuangan dari Pemrintan Provinsi	95.999.999.200,00	97.211.884.740,00	99,20	90.490.859.850,00
19	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	106.328.828.000,00	106.839.218.238,00	100,20	141.083.884.121,00
20	Pendapatan Hibah	106.328.828.000,00	106.328.828.000,00	100,00	141.083.884.121,00
21	Pendapatan Lainnya	0,00	214.511.238,00	0,00	0,00
22	JUMLAH PENDAPATAN	2.842.148.771.721,00	3.641.790.938.777,11	128,11	3.428.878.803.428,13
23	BELANJA				
24	BELANJA OPERASI	2.831.884.866.728,00	3.184.790.792.074,00	84,18	1.861.201.711.028,00
25	Belanja Pegawai	1.114.317.702.730,00	1.091.989.395.990,00	97,99	1.010.111.841.189,00
26	Belanja Mula	1.091.129.459.721,00	981.671.384.413,00	90,80	739.641.580.890,00
27	Bunga	7.000.000.000,00	4.047.853.424,00	57,83	5.427.749.091,00
28	Hibah	72.224.613.297,00	68.284.276.577,00	94,56	68.283.837.887,00
29	Bantuan Sosial	56.709.150.000,00	40.817.650.000,00	67,03	43.090.762.500,00
30	BELANJA MODAL	477.962.796.396,00	410.874.340.797,00	85,76	279.167.283.026,00
31	Belanja Tanah	1.166.560.000,00	498.220.800,00	42,74	3.772.977.408,00
32	Belanja Perlatan dan Mesin	148.720.521.025,00	134.821.926.424,00	91,02	129.790.481.108,00
33	Belanja Gedung dan Bangunan	95.852.615.290,00	79.415.812.555,00	83,26	50.894.858.339,00
34	Belanja Jalan, Jembatan dan Jembatan	318.110.308.810,00	200.897.844.227,00	63,17	169.794.831.171,00
35	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.473.739.984,00	1.637.287.248,00	66,19	1.798.188.800,00
36	Belanja Aset Lainnya	628.813.000,00	277.722.750,00	44,18	1.326.953.376,00
37	BELANJA TAK TERDUGA	90.111.279.990,00	21.400.409.034,00	23,76	108.277.177.990,00
38	Belanja Tak Terduga	90.111.279.990,00	21.400.409.034,00	23,76	108.277.177.990,00
39	JUMLAH BELANJA	3.819.996.970.119,00	3.996.096.930.908,00	104,62	3.999.796.171.992,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.160.887.226.488,00	1.147.825.046.708,92	99,72	1.075.540.928.218,11
411	Pendapatan Pajak Daerah	794.170.000.000,00	744.960.592.000,00	93,79	624.486.554.742,00
412	Pendapatan Retribusi Daerah	37.834.007.000,00	23.942.826.414,00	63,28	35.831.341.939,00
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.169.497.984,00	32.170.048.280,00	100,00	32.420.552.150,00
414	Lain-lain PAD yang Sah	326.707.820.522,00	346.546.576.477,92	106,07	382.002.477.379,11
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.679.248.217.736,00	1.639.428.633.844,00	97,89	1.468.090.794.238,00
421	Transfer Pemrintan Pusat- Dana Pembangan	1.246.848.898.118,00	1.217.886.839.277,00	97,76	1.070.122.260.590,00
42101	Dana Bagi Hasil Pajak	60.362.125.814,00	99.109.979.720,00	164,20	100.309.993.890,00
42102	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	25.489.404.000,00	38.309.610.039,00	142,58	47.781.743.302,00
42103	Dana Alokasi Umum	751.862.545.000,00	745.659.353.200,00	99,17	751.862.545.000,00
42104	Dana Alokasi Khusus	395.416.714.115,00	355.607.096.306,00	89,93	170.166.021.371,00
422	Transfer Pemrintan Pusat- Lainnya	32.308.424.000,00	32.308.424.000,00	100,00	87.017.287.000,00
42201	Dana Penyelesaian	32.308.424.000,00	32.308.424.000,00	100,00	57.017.287.000,00
423	Transfer Pemrintan Provinsi	289.438.274.820,00	288.667.846.998,00	99,74	238.649.379.020,00
42301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	299.438.274.820,00	295.657.846.998,00	98,74	238.649.379.020,00
42302	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Bantuan Keuangan	95.939.820.000,00	93.776.223.568,00	97,75	97.211.884.740,00
43	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.901.246,00	66.478.250,00	1.356,24	108.639.212.238,00
431	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	108.324.704.000,00
432	Pendapatan Dana Danra	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Pendapatan Lainnya	4.901.246,00	55.478.250,00	1.131,94	214.911.238,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.824.140.344.471,00	2.787.106.068.808,92	98,69	2.844.790.938.777,11
6	BELANJA				
61	BELANJA OPERASI	2.843.324.626.728,00	2.498.890.416.770,00	87,90	1.186.790.782.074,00
611	Belanja Pegawai	1.184.422.203.118,00	1.129.093.224.000,00	95,34	1.001.189.309.890,00
612	Belanja Barang	1.133.228.246.082,00	1.006.553.405.102,00	88,92	981.671.384.413,00
1	2	3	4	5	6
613	Bunga	6.750.000.000,00	4.282.386.790,00	74,48	4.047.853.424,00
614	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Hibah	150.295.598.819,00	146.302.819.326,00	97,35	68.284.276.577,00
616	Bantuan Sosial	62.423.675.000,00	61.026.601.500,00	97,59	61.031.817.000,00
62	BELANJA MODAL	624.618.633.833,00	671.948.642.801,00	107,60	418.274.849.797,00
621	Belanja Tanah	25.801.162.564,00	17.328.944.627,00	67,16	496.222.600,00
622	Belanja Perlatan dan Mesin	102.700.955.284,00	93.283.801.959,00	90,83	134.821.926.424,00
623	Belanja Gedung dan Bangunan	205.045.268.681,00	188.457.898.906,00	91,91	79.415.812.539,00
624	Belanja Jalan, Jembatan dan Jembatan	289.018.937.204,00	271.189.473.185,00	93,83	206.667.844.227,00
625	Belanja Aset Tetap Lainnya	74.110.100,00	708.188.872,00	95,55	1.037.371.248,00
626	Belanja Aset Lainnya	1.211.207.000,00	995.497.452,00	82,14	477.772.759,00
63	BELANJA TAK TERDUGA	14.704.016.810,00	6.388.713.426,00	43,42	21.400.409.034,00
631	Belanja Tak Terduga	14.704.016.810,00	6.388.713.426,00	43,42	21.400.409.034,00
	JUMLAH BELANJA	3.182.647.580.119,00	2.984.193.633.000,00	93,77	2.819.466.910.968,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2022

Penulis menggunakan metrik harga/kinerja berdasarkan rasio ekonomi, rasio efektivitas serta rasio efisiensi. Hasil dari analisis dengan menggunakan ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Rasio Ekonomi

Ditetapkan otonomi daerah menuntut pemda agar mampu mengatur keuangan wilayah otonomiyadengan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi biaya kebutuhan

daerahnya disertai pelayanan terbaik kepada masyarakat. Angka ekonomi juga menunjukkan seberapa besar manfaat yang diperoleh masyarakat dari pembayaran pajak dan bea daerah serta mewakili partisipasi masyarakat.

Hasil perhitungan Rasio Ekonomi wilayah Kota Bogor dari tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Ekonomi

Periode	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Transfer	Tingkat Efektivitas	Keterangan
2020	872,017,242,152	1,415,498,666,396	61.6%	Sedang
2021	1,075,240,926,213	1,463,000,794,326	73%	Sedang
2022	1,147,623,045,708	1,639,426,533,844	70.0%	Sedang

Pengukuran tingkat kemandirian kinerja ekonomis keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada table diatas ini, sesuai dengan table dibawah bisa dicermati bahwa di tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022. Pemerintah Kota Bogor berhasil mencapai tingkat kemandirian kinerja antara 61% hingga 73% dengan kriteria cukup mandiri. Kondisi cukup stabil antara tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan tingkat kemandirian sekitar 70%.

Rasio Efektivitas

Dengan mengukur efektivitas, dapat dilihat seberapa baik peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan target yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan pendapatan daerah ditargetkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan pendapatan daerah yang tinggi. Oleh karena itu dapat dikatakan Pemerintah Kota Bogor sudah mencapai kinerja yang efektif sesuai dengan data dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Periode	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Hasil Rasio	Keterangan
2020	872,017,242,152	741,531,123,201	117.6%	Sangat Efektif
2021	1,075,240,926,213	914,550,650,320	118%	Sangat Efektif
2022	1,147,623,045,708	1,150,887,225,486	100%	Efektif

Tingkat efektivitas tertinggi sebesar 117,6% pada tahun 2020, secara umum hal ini menunjukkan Pemerintah Kota mampu memperbaiki dan memantaunya dengan baik melalui retribusi, tuntutan, dan sumber lainnya.

Rasio Efisiensi

Tingkat efisiensi Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2020 tingkat efisiensi sebesar 97%, di tahun 2021 tingkat efisiensi sebesar 100% lalu di tahun 2022 sebesar 107%. Rasio

Efisiensi kinerja keuangan Kota Bogor ini termasuk tidak efisien. Dibawah ini merupakan hasil perhitungan tingkat efisiensi Kota Bogor dari Tahun 2020 hingga 2022:

Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Periode	Anggaran (Rp)	Jumlah yang di Realisasikan (Rp)	Tingkat Efisiensi	Keterangan
2020	2,353,736,171,982	2,428,579,503,649	97%	Kurang Efisien
2021	2,636,065,820,905	2,644,780,935,777	100%	Kurang Efisien
2022	2,984,193,683,003	2,787,105,058,802	107%	Tidak Efisien

Tabel diatas menunjukkan Kota Bogor tergolong tidak efisien pada kategori ini karena tingkat pencapaiannya berada diatas angka 100%. Dan pada tahun 2021 hingga 2022 pemerintah daerah belum mampu memanfaatkan sumber daya anggaran dengan sebaik-baiknya untuk merealisasikan anggaran belanja.

SIMPULAN

Analisis Value For Money (VFM) pada kinerja keuangan Kota Bogor pada tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa Kota Bogor telah memenuhi target yang sudah ditetapkan dengan biaya yang efektif dan efisien. Rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bogor telah mampu mengelola keuangan dengan baik dan mencapai tujuan telah ditetapkan.

Peningkatan Pendapatan: Untuk meningkatkan pendapatan Kota Bogor, dapat dilakukan dengan meningkatkan pajak dan biaya operasional yang efektif dan efisien.

Optimalkan Pengeluaran: Untuk mengoptimalkan pengeluaran Kota Bogor, dapat dilakukan dengan mengurangi biaya yang tidak diperlukan dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kota Bogor, dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan investasi pada infrastruktur dan fasilitas.

Meningkatkan Transparansi: Untuk meningkatkan tranparansi Kota Bogor, dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Bogor, dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengelola keuangan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan.

REFERENSI

- Ain, D. N. (2023). Analisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pada Kantor Desa Jati Mulyo Tanjung Jabung Timur. 125–140.
- Dinamika, J., Pembangunan, E., & Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekade otonomi daerah. *JDEP*, 2(1). Retrieved from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
- Margareta, S., Setiawan, A. B., Warizal, & Triwidatin, Y. (2023). Analysis of performance measurement using the value for money method at departments in the city of Bogor. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(8), 1135–1150. <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i8.5668>
- Musofadillah, R., Hudzafidah, K., Aprilia, T., & Haidiputri, N. (2023). Analisis metode value for money dalam menilai kinerja keuangan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo. 1(2).
- Polii, I., Saerang, D., Tangkuman, S., Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., Tangkuman, S. J., ... & Fakultas Ekonomi dan Bisnis. (2020). Analysis of financial performance measurement of the North Sulawesi Provincial Government based on the concept of value for money. 8(4), 781–788.